



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
2021**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama	4
1.4 Landasan Hukum.....	9
1.5 Sistematika Penyajian.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Rencana Kinerja	14
2.3 Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja	27
3.3 Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Rekomendasi	53
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan BPPKAD Kab. Rembang.....	7
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang.....	13
Tabel 2.2.	Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang 2020-2021.....	15
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun 2021.....	16
Tabel 2.4.	Program dan Kegiatan BPPKAD Tahun Anggaran 2021.....	17
Tabel 3.1.	Skala Penilaian Realisasi Kinerja.....	25
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2021....	26
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	27
Tabel 3.4.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 sd 2021 Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	28
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2016-2021Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	28
Tabel 3.6.	Analisis Penyebab Penurunan Kinerja Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	29
Tabel 3.7.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	30
Tabel 3.8.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	30
Tabel 3.9.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	33
Tabel 4.0.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 sd 2021 Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	33
Tabel 4.1.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2016-2021 Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	34
Tabel 4.2.	Analisis Penyebab Penurunan Kinerja Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	34
Tabel 4.3.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	35
Tabel 4.4.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.....	35
Tabel 4.5.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah.....	37
Tabel 4.6.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 sd 2021 Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah.....	37
Tabel 4.7.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2016-2021 Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah.....	37
Tabel 4.8.	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah...	38

Tabel 4.9.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah....	39
Tabel 5.0.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah....	39
Tabel 5.1.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan.....	40
Tabel 5.2.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 sd 2021 Capaian Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan.....	41
Tabel 5.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2016-2021 Capaian Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan.....	41
Tabel 5.4.	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan.....	42
Tabel 5.5.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan.....	43
Tabel 5.6.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan.....	43
Tabel 5.7.	Target dan Realisasi Capaian Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	44
Tabel 5.8.	Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 sd 2021 Capaian Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	45
Tabel 5.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra 2016-2021 Capaian Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	45
Tabel 6.0.	Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja Capaian Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah....	46
Tabel 6.1.	Analisis Penggunaan Sumber Daya Capaian Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah....	47
Tabel 6.2.	Analisis Program Penunjang Keberhasilan Capaian Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah....	47
Tabel 6.3.	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan BPPKAD tahun 2021.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	4
---	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Nomor 900/0019/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016- 2021. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2016-2021 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Rembang, 18 Februari 2022

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710225 199803 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kab./Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Eksistensi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sebagai Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, memiliki peranan yang cukup strategis dalam mendukung kemampuan keuangan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sejalan dengan penataan struktur dan personil yang dilakukan dalam tahun 2016 dan sebagai penjabaran teknis untuk mendukung tugas pokok dan fungsi utamanya, maka telah dilakukan penyesuaian tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik, ada tiga pilar pokok untuk menyangga terwujudnya *good governance* antara lain *clean government*, profesionalisme personal dan kestabilan masyarakat.

Untuk mengarah pada terwujudnya *good governance* dapat terlihat dalam indikasi yaitu dengan adanya demotivasi, desentralisasi, transparansi, konsistensi dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan terhadap publik.

Sedangkan peningkatan pelayanan yang prima dapat teridentifikasi melalui kecepatan, ketepatan, kemudahan dan transparansi dalam sistem dan pembiayaan dengan dukungan personal yang memahami akan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam kondisi yang diharapkan itu maka perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan haruslah disusun secara cermat sehingga hasil dari perencanaan tersebut dapat lebih akurat, visioner, obyektif, terarah, terpadu dan berkesinambungan, serta pendekatan pelayanan masyarakat itu diharapkan agar tumbuh adanya *feedback* (timbang balik) antara pemerintah dan masyarakat, terutama Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah agar tercipta keselarasan yang aspiratif, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan *income* daerah.

Berbagai hasil yang dicapai tahun 2021, menunjukkan indikasi keseriusan seluruh aparat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menuju langkah - langkah pola kerja profesionalisme, efektif dan efisien sesuai yang diharapkan pemerintah dimasa mendatang agar lebih berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yaitu : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Aset dan Bidang Akuntansi adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai perangkat daerah yang ditetapkan oleh Bupati selain sebagai pengguna

anggaran/ pengguna barang juga melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Keuangan;
- b) pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan;
- e) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f) pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- g) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 1 orang Kepala Badan, 1 Orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Sub Bidang, Pelaksana Teknis Badan serta kelompok jabatan fungsional.

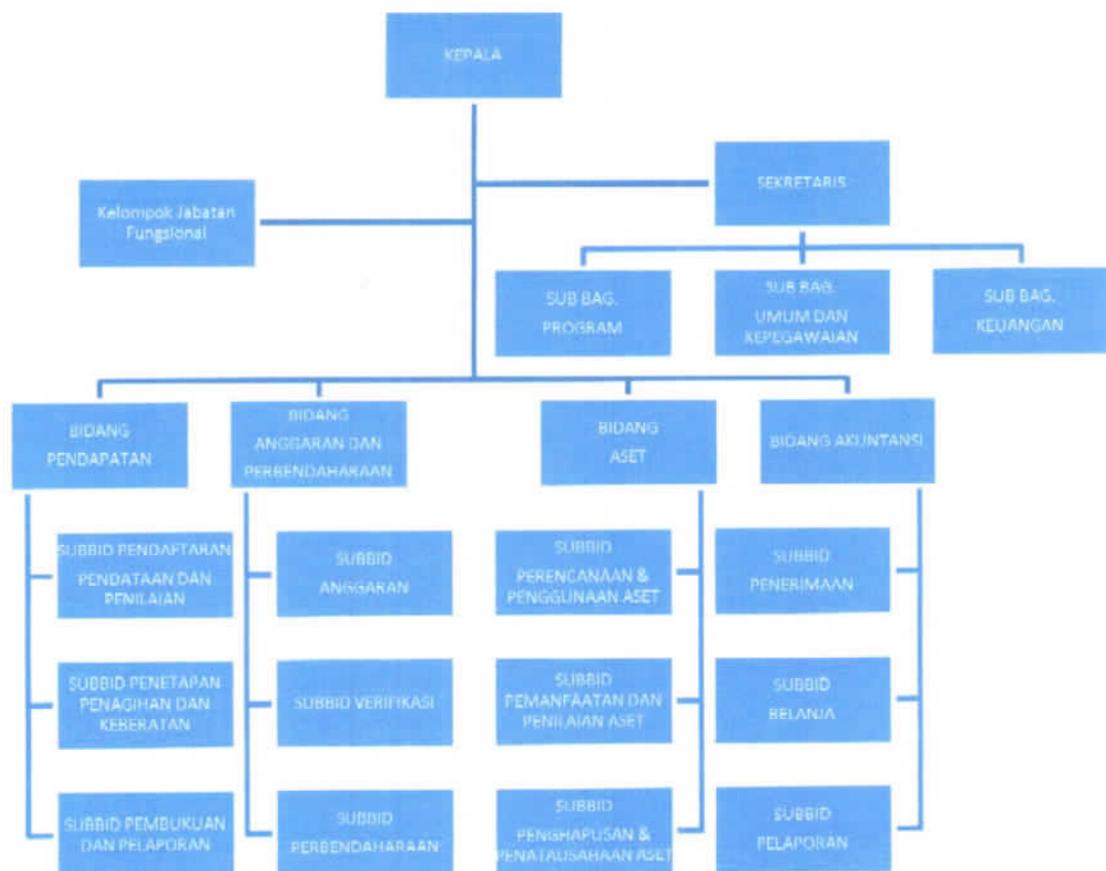
Susunan Struktur Organisasi terdiri dari :

- a) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b) Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bidang Pendapatan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian;
 2. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan;
 3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- d) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Anggaran ;
 2. Sub Bidang Verifikasi ;
 3. Sub Bidang Perbendaharaan;
- e) Bidang Akuntansi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penerimaan;
 2. Sub Bidang Belanja;
 3. Sub Bidang Pelaporan;

- f) Bidang Aset terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset ;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penilaian Aset ;
 3. Sub Bidang Penghapusan dan Penatausahaan Aset;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Bagan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang



1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI & PERMASALAHAN UTAMA

Berpijak pada nilai strategis keberadaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di atas, maka peran dalam mendukung Pendapatan, penyediaan keuangan dan aset daerah cukup memiliki arti yang sangat penting dalam struktur pemerintahan di daerah.

Sumber-sumber daya dukung organisasi, tidak akan lepas dari tingkat keberhasilan organisasi, baik dari sisi perangkat hidup, perangkat keras dan perangkat lunaknya.

A. Kondisi dan Potensi

1) Internal

Keberhasilan organisasi perangkat daerah tidak lepas dari dukungan personil aparat maupun kualitas SDM yang diselaraskan dengan beban kerja yang diembannya.

Jumlah personil Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 sebanyak 155 orang terdiri dari:

a) Pegawai menurut status

1. PNS : 93 orang
2. CPNS : 0 orang
3. Kontrak : 5 orang
4. Harian Lepas : 57 orang

b) Jenis Kelamin

1. Pria : 115 orang
2. Wanita : 40 orang

c) Pendidikan Formal

1. S3 : 1 orang
2. S2 : 11 orang
3. S1 : 57 orang
4. D4 : 1 orang
5. D3 : 6 orang
6. SMA/SMK : 75 orang
7. SMP : 3 orang
8. SD : 1 orang

d) Golongan Pangkat

1. Gol IV : 7 orang
2. Gol III : 64 orang
3. Gol II : 22 orang
4. Gol I : 0 orang
5. Non Gol./ Kontrak : 62 orang

e) Jabatan

1. Struktural
 - i. Eselon II : 1 orang
 - ii. Eselon III : 4 orang
 - iii. Eselon IV : 13 orang
2. Non struktural : 137 orang

- f) Kualifikasi pekerjaan
1. Administrasi : 150 orang
 2. Teknis : 5 orang

2) Eksternal

Optimalisasi peningkatan PAD selain di dukung langkah - langkah yang inovatif dengan melalui kerjasama (MOU) dengan pihak ketiga, juga adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.

Dalam Tahun 2021, jumlah Wajib Pajak di daerah Kabupaten Rembang yang tercatat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terdiri dari :

- Wajib Pajak Hotel	=	24	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Restoran	=	3.087	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Sarang Burung	=	57	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Reklame	=	720	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Hiburan	=	34	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Bahan Galian gol C	=	471	Wajib Pajak
- Wajib Pajak BPHTB	=	Se-Kab. Rembang	
- Wajib Pajak PBB	=	401.493	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Parkir	=	86	Wajib Pajak
- Wajib Pajak Air Tanah	=	120	Wajib Pajak
- Wajib Pajak PPJU	=	Se-Kab. Rembang	

Sedangkan Wajib Retribusi (WR) yang menjadi kewenangan BPPKAD Kabupaten Rembang terdiri dari :

- Sewa Tanah	=	111	Wajib Retribusi
- Rumah Badan	=	80	Wajib Retribusi

Sebagaimana diatur dalam undang - undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka alat bukti pemungutan Retribusi Daerah dapat digunakan bentuk dokumen lain yang sah seperti karcis, nota dan sejenisnya.

3) Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum pada tabel 1.1. berikut ini:

Tabel 1.1.
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
BPPKAD Kab. Rembang

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	2	3	4
	A. Alat-alat Besar	1	182,745,000.00
1	- Portable Generating Set	1	182,745,000.00
	B. Alat-alat Angkutan	83	3,233,082,682.00
1	- Station Wagon	9	2,073,084,863.00
2	- Sepeda Motor	74	1,159,997,819.00
	C. Alat Bengkel dan Alat Ukur	13	1,055,539,900.00
1	- Mesin Bor	1	2,500,000.00
2	- Mesin Pelubang	1	9,850,000.00
3	- Kunci Khusus Pembuka Mur/Baud	2	1,000,000.00
4	- ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	9	1,042,189,900.00
	D. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,131	4,736,161,810.50
1	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	2,000,000.00
2	- Mesin Ketik Listrik Portable	3	9,100,000.00
3	- Mesin Hitung Listrik	2	2,750,000.00
4	- Mesin Penghitung Uang	3	43,200,000.00
5	- Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2	23,910,000.00
6	- Lemari Besi	9	30,197,500.00
7	- Rak Kayu	33	99,218,600.00
NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI
1	2	3	4
8	- Filling Besi/Metal	23	56,521,000.00
9	- Band Kas	1	31,500,000.00
10	- Lemari Sorok	1	4,240,000.00
11	- Lemari Kaca	7	47,240,000.00
12	- Lemari kayu	5	28,825,000.00
13	- Perkakas Kantor	2	20,627,000.00
14	- Papan Nama Instansi	1	3,233,000.00
15	- Papan Pengumuman	199	174,390,500.00
16	- Overhead Projektor	1	9,115,000.00
17	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2	7,225,000.00
18	- Lemari Kayu	11	40,633,000.00
19	- Meja Kayu/Rotan	67	99,848,012.50

20	- Kursi Besi/Metal	53	29,737,600.00
21	- Kursi Kayu/Rotan/Bambu	60	52,224,500.00
22	- Meja Rapat	16	55,792,500.00
23	- Meja Telpon	3	2,415,000.00
24	- Kursi Rapat	118	59,884,480.00
25	- Kursi Tamu	6	33,225,000.00
26	- Kursi Putar	24	21,534,000.00
27	- Bangku Tunggu	5	8,999,925.00
28	- Kursi Lipat	15	5,250,000.00
29	- Meja Komputer	14	13,202,500.00
30	- Mesin Penghisap Debu	2	6,000,000.00
31	- AC Split	31	155,581,000.00
32	- Televisi	10	42,949,000.00
33	- Sound System	1	2,845,000.00
34	- Unit Power Supply	40	115,348,360.00
35	- Stabilisator	1	7,120,000.00
36	- Tangga Alumunium	2	5,320,000.00
37	- Dispenser	3	4,450,000.00
38	- Handy Cam	3	27,370,000.00
39	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	11	46,633,998.00
40	- Alat Pemadam Portable	3	3,465,000.00
41	- Mainframe	4	116,160,000.00
42	- Mini Komputer	3	2,700,000.00
43	- P.C Unit	40	413,732,390.00
44	- Lap Top	74	753,991,805.00
45	- Note Book	31	314,650,000.00
46	- Personal Komputer Lain-lain	9	84,475,000.00
47	- CPU	1	10,135,000.00
48	- Hard Disk	1	2,750,000.00
49	- Printer	57	367,092,480.00
50	- Scanner	1	6,250,000.00
51	- Monitor	4	13,140,000.00
52	- Printer	34	405,281,460.00
53	- Scanner	5	37,150,000.00
54	- External	2	5,800,000.00
55	- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	12	72,522,000.00
56	- Server	8	468,718,700.00
57	- Peralatan Jaringan Lain-lain	10	126,802,500.00
58	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	26,260,000.00
59	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	9,862,500.00
60	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	4	27,044,000.00
61	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2,175,000.00
62	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	12,722,500.00
63	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	22,975,000.00

64	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	650,000.00
E. Alat Studio dan Alat Komunikasi		33	260,622,498.00
1	- Camera + Attachment	1	4,400,000.00
2	- Proyektor + Attachment	7	88,508,000.00
3	- Microphone/Wireless Mic	11	69,000,000.00
4	- Power Supply Microphone	1	25,000,000.00
5	- Camera Electronic	9	61,679,498.00
6	- Lensa Kamera	1	6,835,000.00
7	- Pesawat Telephone	2	3,700,000.00
8	- Antena SHF/Parabola Portable	1	1,500,000.00
TOTAL		1,261	9,468,151,890.50

Untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan serta penerapan sistem *E-Government*, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang menerapkan Sistem Aplikasi :

- a) SIMPATDA
- b) E-PBB
- c) E-BPHTB
- d) SIPD
- e) SIMDA Keuangan
- f) SIMDA Barang
- g) SIMDA GAJI

Adapun permasalahan utama dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah :

- 1) Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra SKPD;
- 2) Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang , khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
- 3) Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.4. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Surat Keputusan LAN Nomor 239 Tahun 2003 berisikan dilengkapi dengan isi pelaporan LKjIP terdiri dari BAB I PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis organisasi dan permasalahan utama, disusul dengan BAB II PERENCANAAN KINERJA meliputi hal-hal yang menyangkut rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Pada BAB III AKUNTABILITAS KINERJA meliputi hasil pengukuran kinerja, pencapaian indikator - indikator sasaran dan analisa/evaluasi kinerja kegiatan. Dan pada bagian PENUTUP tercermin harapan - harapan ke depan yang melatarbelakangi hasil pencapaian kinerja tahun 2021 ini.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang berpedoman pada tiga pilar pokok untuk menyangga terwujudnya *Good Governance* antara lain *Clean Government*, Profesionalisme Personal dan Kestabilan Masyarakat. Untuk mengarah pada terwujudnya *Good Governance* dapat terlihat dalam indikasi yaitu dengan adanya demotivasi, desentralisasi, transparansi, konsistensi dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan terhadap publik. Sedangkan peningkatan pelayanan yang prima dapat teridentifikasi melalui kecepatan, ketepatan, kemudahan dan transparansi dalam sistem dan pembiayaan sehingga semua personal memahami akan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam kondisi yang diharapkan itu maka perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan haruslah disusun secara cermat sehingga hasil dari perencanaan tersebut dapat lebih akurat, visioner, obyektif, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan tujuan, strategi dan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Adapun Tujuan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan untuk kurun waktu 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja didukung SDM yang Tangguh. Indikator Tujuan : Nilai SAKIP OPD.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Indikator Tujuan : Indeks kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Indikator Tujuan : Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah.
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel. Indikator Tujuan : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

B. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Ketepatan Capaian Target Kinerja, Ketepatan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Indikator Sasaran : Nilai Komponen Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Evaluasi, Capaian dalam Penilaian SAKIP.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik. Indikator Sasaran : Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
3. Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah. Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan PAD.
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan. Indikator Sasaran : Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan).
5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Indikator Sasaran : Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPPKAD Kabupaten Rembang beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 2.1. sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai SAKIP OPD	60-70	70-80
			Indeks Kepuasan Masyarakat	78,5-82,25	82,26-88,30
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	60-70	70-80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan	90.00%	95.00%
2	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah		Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	15.97%	16.09%
		Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	3.84%	3.85%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	100.00%	100.00%
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100.00%	100.00%

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang mewujudkan sistem perencanaan daerah yang partisipatif, koordinatif, sinergi dan komprehensif serta tersusun secara sistematis melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Sedangkan berkaitan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021, terdapat 5 (lima) indikator kinerja program yang menggambarkan kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- 1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
- 3) Persentase Peningkatan PAD
- 4) Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)
- 5) Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu

Adapun Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang merupakan proyeksi atas Indikator Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 dan Rentra BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.
Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD
Kabupaten Rembang 2020-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15.85%	15.97%	16.09%	16.09%
3	Persentase Peningkatan PAD	%	1.78%	3.84%	3.85%	3.85%
4	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam periode waktu satu tahun. Dokumen perjanjian kinerja yang telah disusun merupakan komitmen Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPPKAD sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Bupati Rembang sebagai pihak ke-dua selaku pemberi amanah yang telah ditandatangani oleh kedua pihak.

Dalam dokumen penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan penetapan kinerja aparatur, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target kinerja yang ingin dicapai juga memuat anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Penyusunan PK BPPKAD berdasarkan pada Rencana Strategis BPPKAD, Rencana Kinerja BPPKAD tahun 2021, IKU BPPKAD. Penetapan Kinerja BPPKAD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja BPPKAD Kab. Rembang
Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2021
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai SAKIP OPD	70-80
			Indeks Kepuasan Masyarakat	82,26-88,30
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	70-80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan	95.00%
2.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah		Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	16,09 %
		Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	3,85%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	100.00%
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100.00%

Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPKAD tahun 2021 membutuhkan anggaran belanja langsung semula sebesar Rp. 440.338.789.000,- setelah Perubahan APBD Kabupaten Rembang tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 420.073.561.147,- Anggaran tersebut dibutuhkan oleh BPPKAD untuk melaksanakan program pokok/utama yang berjumlah 4 program utama dan 13 kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan pokok/utama beserta pagu anggaran belanja langsung per sasaran strategis dan per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4.
Program dan Kegiatan BPPKAD
Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	70-80	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,26-88,30	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	70-80	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	70,0 %	18.677.314.147,00
		Persentase Capaian Pelayanan Umum	95,0 %	
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,0%	
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95,0 %	
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95,0 %	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan	100,0 %	72.675.000,00
		Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100,0 %	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	2 dokumen	29.200.000,00
		Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2025	1 dokumen	
		Terlaksananya Forum Organisasi Perangkat Daerah	1 kegiatan	
	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-DPA induk 2022 dan RKA-DPA perubahan 2021	4 dokumen	10.000.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP Perangkat Daerah dan LPPD Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monev Triwulanan	4 kegiatan	29.475.000,00
		Tersusunnya Peta Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah	2 dokumen	
		Persentase Informasi yang disampaikan Ke Publik	90,0 %	
1.2	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95,0 %	15.356.574.147,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji ASN di Lingkungan BPPKAD Rembang	1 tahun	14.747.804.147,00
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tertib Pencairan Keuangan	95,0 %	582.770.000,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan	Tersusunnya Laporan	2 dokumen	12.000.000,00

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Perangkat Daerah		
	4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Pemeriksaan Tanggapan	Terfasilitasinya Pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4 bulan	14.000.000,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memahami Peraturan Perundang-Undangan	95,0 %	16.350.000,00
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memahami Peraturan Perundang-undangan	95,0 %	16.350.000,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	95,0 %	394.000.000,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	7.000.000,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Dekorasi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	29.000.000,00
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	12 bulan	12.000.000,00
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rutin Kantor	12 bulan	60.000.000,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak (Karcis dan Blangko) dan Penggandaan	12 Bulan	137.000.000,00
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Berlangganan Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	9.000.000,00
	7. Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	60.000.000,00
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	80.000.000,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	100	924.520.000,00
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Mobil Dinas Jabatan	1 unit	512.000.000,00
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mobil Dinas Operasional	1 unit	170.000.000,00
	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 unit	208.995.000,00
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 unit	33.525.000,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Ketercukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	100 %	1.639.709.000,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Jasa Pengiriman Paket	12 bulan	2.700.000,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet	12 bulan	256.200.000,00
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa-Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pengelolaan	12 bulan	1.380.809.000,00

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
		Barang Pembayaran Honor Pegawai Honorer/ Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas	12 bulan	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	273.486.000,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	90	119.956.000,00
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12	30.800.000,00
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rutin/ Berkala Gedung Kantor	4	60.000.000,00
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12	62.730.000,00
	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	
	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN	%Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	100%	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100,0 %	396.286.247.00,00
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100,0 %	
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	100,0 %	1.150.000.000,00
	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1 dokumen	340.000.000,00
		Terfasilitasinya TAPD Kabupaten Rembang	12 bulan	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1 dokumen	80.000.000,00
	3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	40 SKPD	30.000.000,00
	4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Tersusunnya DPA SKPD/Perubahan RKA SKPD	40 SKPD	30.000.000,00
	5. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2 peraturan	100.000.000,00
	6. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 peraturan	130.000.000,00
	7. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Perkada tentang Kodifikasi/ Penganggaran	1 perkada	60.000.000,00

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
	8. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terfasilitasinya Input Data e-Budgetting	40 SKPD	50.000.000,00
	9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersusunnya Dokumen Anggaran BOS Tersusunnya Laporan Penggunaan DID Tersusunnya Dokumen Anggaran Banprov	526.0 satuan pendidikan 40 SKPD 40 SKPD	255.000.000,00
	10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terfasilitasinya Keuangan SKPKD	12 bulan	75.000.000,00
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Jenis Dokumen yang dihasilkan	5.0 dokumen	798.994.000,00
	1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tepat waktu penerbitan Laporan Kas Daerah	100,0 %	50.000.000,00
	2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tepat waktu pencairan anggaran transfer ke RKUD Pemerintah Kabupaten Rembang	100,0 %	60.000.000,00
	3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai	40 SKPD	50.000.000,00
	4. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Allran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Prosentase Penyerapan Anggaran sesuai dengan Anggaran Kas	90,0 %	380.250.000,00
	5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Terfasilitasinya Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penerbitan SP2D	100,0 %	209.000.000,00
	6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertib Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 SKPD	49.744.000,00
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100,0 %	680.000.000,00
	1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersusunnya laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja Perangkat Daerah	40 SKPD	43.033.050,00
	2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Prosentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	100,0 %	23.430.000,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Prosentase Laporan Keuangan Pemerintah daerah Akuntabel dan disampaikan Tepat Waktu	100,0 %	3.920.260,00
	4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Akuntabel dan Tepat Waktu	100,0 %	198.702.400,00

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
	5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100,0 %	66.455.490,00
	6. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Perkada	134.528.300,00
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Perda	
	7. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	47.460.500,00
	8. Pembinaan Akuntansi, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	40 SKPD	153.760.000,00
	9. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	18 BLUD	3.900.000,00
	10. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	4.810.000,00
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Bankeu, Belanja Tidak terduga dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	90%	393.657.253.000,00
	1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Terselenggaranya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	90%	375.259.329.000,00
	2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terbayarkannya pengeluaran Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya	90%	6.425.000.000,00
	3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	90%	11.972.924.000,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	100,0 %	1.350.000.000,00
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Aset sesuai dengan SAP	100,0 %	1.350.000.000,00
	1. Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Perkada tentang Standardisasi Indeks Satuan Biaya dan Kegiatan Pemerintah Daerah	1 Perkada	150.000.000,00
		Tersusunnya Perkada tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah	1 Perkada	

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
		Daerah		
	2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	40 SKPD 40 SKPD	71.500.000,00
	3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi dan Fasilitasi SIMDA BMD	40 SKPD	248.700.000,00
	4. Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya premi asuransi kebakaran dan kecelakaan	40 SKPD	480.000.000,00
	5. Penilaian Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penilaian BMD dalam Rangka Penyusunan Neraca, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan	40 SKPD	90.000.000,00
	6. Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	40 SKPD	70.000.000,00
	7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang- undangan Terfasilitasinya Penghapusan BMD yang tidak layak pakai	40 SKPD 40 SKPD	170.000.000,00
	8. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40 SKPD	69.800.000,00
	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	16.09%	
	MENINGKATNYA PENERIMAAN PADA SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH	%Peningkatan PAD	3.85%	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100,0 %	3.760.000.000,00
4.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100,0%	3.760.000.000,00
	1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Peningkatan SDM Penunjang Kompetensi tentang Pajak Daerah	14 Kecamatan	247.240.000,00
	2. Analisa dan Pengembangan Pendapatan Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5,0 %	442.600.000,00
	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya Pengetahuan Juru Pungut PBB-P2	294.0 desa/kelurahan	481.700.000,00
	4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Tersajinya Dokumen Database Potensi Pendapatan Asli Daerah	100,0%	199.400.000,00
	5. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terpeliharanya Database Pajak Daerah dan PBB-P2	100,0 %	258.500.000,00
	6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peningkatan SDM Penunjang Kompetensi tentang PBB P2	14 Kecamatan	1.363.000.000,00
	7. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	218.560.000,00

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran
8.	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	50%	518.000.000,00
9.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Evaluasi Data Potensi dan Penyajian Data Realisasi Pendapatan Daerah	100,0 %	33.000.000,00
JUMLAH				420.073.561.147,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah perwujudan kewajiban Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pada BAB III mengenai Akuntabilitas Kinerja ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisa dan evaluasi akuntabilitas kinerja, realisasi anggaran, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah yang diambil guna mengatasi hambatan / kendala dan permasalahan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran. Adapun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Indikator}}{\text{Rencana Kinerja Indikator}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut dengan menggunakan skala. Adapun pengukuran atas capaian kinerja tersebut mempergunakan skala penilaian realisasi kinerja pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.
Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 100	Sangat Baik
2	85- 100%	Baik
3	65- 84,99%	Cukup
4	50- 64,99%	Kurang
5	≤ 50 %	Sangat Kurang

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2021 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja BPPKAD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja BPPKAD Kab. Rembang
Tahun Anggaran 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2021		Capaian			Renstra	
			Target	Realisasi	2021	2020	2019	Target Akhir 2021	Capaian (%) s/d 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai SAKIP OPD	70-80	67,64	84,55%	101,05%	100,00%	70-80	66,62
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,26-88,30	82,26	100%	100,16%	-	82,26-88,30	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	70-80	67,64	84,55%	100,00%	100,00%	70-80	66,62
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan	95%	31,57	33,23%	100%	-	95%	34,97
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah		Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	16,09%	21,40%	133,00%	106,69%	-	16,09%	16,91
	Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	3,85%	29,14%	756,88%	44,77%	29,321%	3,85%	556,88
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	100%	100%	100,00%	50,00%	WTP	100
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	100%	75%	75,00%	100,00%	100,00%	100%	75
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100
Rata - Rata					163,02%	94,74%	88,22%		124,11

Dari hasil pengukuran capaian pada tahun anggaran 2020 atas 9 (sembilan) indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 5 (sembilan) indikator kinerja menunjukkan katagori Baik dengan persentase capaian diatas 85%, dan 3 indikator menunjukkan ketegori cukup dengan persentase capaian 70%-84,99%, serta 1 indikator menunjukkan angka < 50% yaitu sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2021 sebesar 163,02 % lebih baik dibandingkan rata-rata capaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2020 sebesar 94,74%.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Tujuan 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

1) Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran 1. "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" mendukung atas ketercapaian Indikator Tujuan "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik" yaitu "Nilai SAKIP OPD". Sasaran 1. "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" pada tahun 2020 terdiri dari satu indikator yaitu "Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD" yang diukur dengan Hasil Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 pada BPPKAD Kabupaten Rembang yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang.

Pada Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Rembang telah melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2020 dengan nilai 67,64. Adapun Target dan realisasi kinerja untuk sasaran 1 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi
Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	70-80	67,64	66,62	Cukup	Hasil Evaluasi Inspektorat Kab. Rembang tanggal 14 Juni 2021 atas SAKIP BPPKAD tahun 2020
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	70-80	67,64	66,62	Cukup	

Kemudian perbandingan antara target,realisasi, dan capaian kinerja untuk sasaran 1 tersebut diatas pada tahun 2021 dan dua tahun sebelumnya terlampir sebagai berikut dalam Tabel 3.4.:

Tabel 3.4.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 sd 2021
Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%) 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	60-70	65,68	100	60-70	65,68	100	70-80	67,64	66,62
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	60-70	65,68	100	60-70	65,68	100	70-80	67,64	66,62

Untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 tersebut diatas pada tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan
Target Akhir Renstra 2016-2021
Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	67,64	70-80	66,62 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	67,64	70-80	66,62 %

Adapun analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja
Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	70-80	65,68	66,62	- Keterbatasan Kapasitas SDM dalam mendukung kinerja BPPKAD baik dari Aspek Perencanaan, Penganggaran maupun Pelaporan; - Ketercukupan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Aparatur; - Kesadaran Pejabat pada masing - masing Bidang akan indikator capaian kinerja yang harus di capai; - Belumnya adanya Pemetaan Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan; dan - Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester);	- Peningkatan Kapasitas SDM dalam mendukung kinerja BPPKAD baik dari Aspek Perencanaan, Penganggaran maupun Pelaporan; - Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Aparatur melalui pengadaan dan pemeliharaan rutin; - Sosialisasi SAKIP kepada Pejabat dan Pelaksana pada masing - masing Bidang akan target indikator capaian kinerja yang harus di capai; - Penyusunan Peta Resiko Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan oleh masing - masing Bidang; dan - Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester);
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	70-80	65,68	66,62		

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7.

**Analisis Penggunaan Sumber Daya
Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021**

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran(Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	70-80	65,68	66,62	18.677.314.147,00	17.292.912.091	92,58	Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70-80	65,68	66,62				

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8.

**Analisis Program Penunjang Keberhasilan
Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	66,62	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	66,62		Persentase Capaian Pelayanan Umum	95	Menunjang
					Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95	Menunjang
					Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95	Menunjang
					Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95	Menunjang
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	66,62	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	66,62	Menunjang

	Perangkat Daerah						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	66,62				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	66,62	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Keuangan	100	Menunjang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	66,62				
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	66,62	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Data Kepegawaian ASN sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	Menunjang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	66,62				
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	66,62	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100	Menunjang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	66,62				
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	66,62	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	95	Menunjang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	66,62				
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat	Nilai SAKIP OPD	66,62	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketercukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	96	Menunjang

	Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	66,62				
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	66,62	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam kondisi Baik	95	Menunjang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	66,62				

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, pada tahun 2021 belum sesuai dengan target dikarenakan ada beberapa hambatan sesuai dengan tabel 3.6, tetapi pada penyerapan anggaran terealisasi sebesar 92,58% sebagaimana dalam tabel 3.7 sehingga diharapkan pada tahun mendatang akan meningkat mendekati angka target.

B. Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Sasaran 2. "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah" mendukung atas ketercapaian Indikator Tujuan "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik" yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat". Sasaran 2. "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah" pada tahun 2021 terdiri dari satu indikator yaitu "Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan" yang diukur dengan membandingkan informasi wajib yang harus di umumkan/tayangkan pada Website BPPKAD Kabupaten Rembang dan Pemkab Rembang.

Dari 19 Data Keuangan dan Pelaporan yang harus disajikan sebenarnya BPPKAD Kabupaten Rembang telah dapat mensajikan/mengumumkan secara keseluruhan, akan tetapi yang baru dapat disajikan dengan tepat waktu adalah 6 Data Keuangan dan Pelaporan sehingga realisasinya adalah 31,57 %.

Adapun Target dan realisasi kinerja untuk sasaran 2 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.9. berikut ini:

Tabel 3.9.
Target dan Realisasi
Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,26-88,30	94,39	66,62	Baik	- Kuesioner terhadap 100 Wajib Pajak Daerah pada tanggal 24-30 Desember 2021
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan	95%	31,57	33,23	Sangat kurang	- Website Pemkab Rembang dan BPPKAD Kabupaten Rembang

Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 s/d tahun 2021 untuk Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.0.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 sd 2021
Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%) 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	78,5-82,25	80,5	100,16	82,26-88,30	82,26	100,16
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan	-	-	-	90	90	100	95	31,57	33,23

Untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran 2 tersebut diatas pada tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan
Target Akhir Renstra 2016-2021
Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,26	82,26-88,30	100,16
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan	31,57	95	33,23

Adapun analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.

**Analisis Penyebab Penurunan Kinerja
Capaian Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021**

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,26-88,30	82,26	100,16	- Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam memberikan Pelayanan;	- Penyediaan dan memaksimalkan Sarana dan Prasarana yang ada dalam memberikan Pelayanan;
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan	95	31,57	33,23	- Keterbatasan Kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan; - Kurang updatenya data akan keuangan dan pelaporan yang di publikasikan; - Beberapa data pelaporan yang perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum di publikasikan	- Perekrutan Tenaga Administrasi dan Peningkatan Kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan; - Update data keuangan dan pelaporan secara berkala yang di publikasikan; - Penjadwalan evaluasi data pelaporan secara berkala dan terstruktur yang akan di publikasikan.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Analisis Penggunaan Sumber Daya
Capaian Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran(Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,26	100,16	72.675.000	60.213.500	82,85	Cukup
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan	31,57	33,23				

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 4.4.
Analisis Program Penunjang Keberhasilan
Capaian Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,16	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100,16	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan	33,23	a.1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	100	Menunjang
					Terlaksananya Forum Organisasi Perangkat Daerah	100	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				a.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-DPA induk 2022 dan RKA-DPA perubahan 2021	100	Menunjang

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, pada tahun 2021 belum sesuai dengan target dikarenakan ada beberapa hambatan sesuai dengan tabel 4.3, tetapi pada penyerapan anggaran terealisasi sebesar 82,85% sebagaimana dalam tabel 4.2 sehingga diharapkan pada tahun mendatang akan meningkat mendekati angka target.

C. Tujuan 2. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

3) Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah

Sasaran 3. "Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah" mendukung atas ketercapaian Indikator Tujuan "Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah" yaitu "Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah". Sasaran 3. "Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah" pada tahun 2021 terdiri dari satu indikator yaitu "Persentase Peningkatan PAD" yang diukur dengan membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Berkenaan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Sebelumnya.

Untuk realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 405.195.181.445,46 sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang adalah sebesar Rp. 1.892.657.491.765,46 sehingga dapat dihitung Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 adalah sebesar 21,40% sedangkan realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 313.748.138.355,99 sehingga dapat dihitung Persentase Peningkatan PADnya adalah sebesar 17,04%. Untuk Peningkatan PAD pada Tahun 2021 telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 16,09%.

Adapun Target dan realisasi kinerja untuk sasaran 3 tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut ini:

Tabel 4.5.
Target dan Realisasi Capaian Sasaran 3.
Meningkatnya Penerimaan pada
Sektor Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	16,09%	21,40%	133	Sangat Baik	LRA BPPKAD 2021 dan LRA BPPKAD 2020
2	Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	3,85%	29,14%	756,88	Sangat Baik	

Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 s/d tahun 2021 untuk Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 sd 2021
Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan pada
Sektor Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%) 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	-	-	15,97%	17,04%	106,69%	16,09%	21,40%	133
2	Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	13,53	3,97%	29,32%	3,84%	1,72%	44,77%	3,85%	29,14%	756,88

Untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran 3 tersebut diatas pada tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan
Target Akhir Renstra 2016-2021
Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan pada
Sektor Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,40%	16,09%	133%
2	Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	29,14%	3,85%	756,88%

Adapun analisis penyebab meningkatnya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja
Capaian Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan pada
Sektor Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	16,09 %	21,40%	133	- Adanya Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> yang sangat mempengaruhi pendapatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;	- Pemberian stimulan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terkena dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> ;
2	Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	3,85%	29,14%	756,88	- Tidak Optimalnya proses pelayanan perubahan SPPT PBB-P2;	- Pengadaan Jasa Konsultasi Pendampingan Pelaksanaan Pendataan PBB-P2 Individual;
						- Tidak Validnya data Objek Pajak dan Retribusi Daerah;	- Intensifikasi pendataan objek Pajak dan Retribusi Daerah;
						- Tidak Optimalnya Proses Pendataan PBB-P2 Individual;	- Pembaharuan Sistem pengelolaan Pendapatan Daerah;
						- Kurang Updatenya Sistem yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Daerah;	- Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
						- Tidak tertagihnya Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;	- Optimalisasi Penagihan PBB-P2 dengan melibatkan Kecamatan dan Desa;
						- Tidak Optimalnya Proses Penagihan PBB-P2;	- Intensifikasi dalam Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan melibatkan Satpol PP beserta unsur dari Polres, Kejaksaan dan Kodim;
						- Kurang Optimalnya Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah; dan	- Pemberian Pembekalan terhadap pemungut PBB-P2 pada tingkat desa; dan
						- Kurangnya pengetahuan terhadap proses pemungutan PBB-P2 oleh pemungut tingkat desa	

							- Melakukan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
--	--	--	--	--	--	--	---

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Analisis Penggunaan Sumber Daya
Capaian Sasaran 3.Meningkatnya Penerimaan pada
Sektor Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran(Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	16,09%	21,40%	133	3.760.000.000	3.255.750.086	86,59	Baik
2	Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	3,85%	29,14%	756,88				

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 5.0.
Analisis Program Penunjang Keberhasilan
Capaian Sasaran 3.Meningkatnya Penerimaan pada
Sektor Pendapatan Asli Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	133	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100	Menunjang
2	Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	756,88				

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran 3. Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021, pada tahun 2021 sudah sesuai dengan target.

D. Tujuan 3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

4) Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

Sasaran 4. "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan" pada tahun 2021 terdiri dari indikator "Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)" yang diukur dengan membandingkan Realisasi Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan) dengan *Deadline* Jadwal Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan).

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 29 Oktober sehingga lebih lama dari batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 September 2021. Sedangkan pada tanggal 29 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sehingga lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 Desember 2021 sehingga dapat dihitung capaian Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD baik induk maupun perubahan adalah 100 %.

Adapun Realisasi Capaian pada Sasaran 4. "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan" pada tahun 2021 dan Perbandingan terhadap capaian dua tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut :

**Tabel 5.1.
Target dan Realisasi
Capaian Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	100%	75%	75	Baik	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran

Tabel 5.4.
Analisis Penyebab Penurunan Kinerja
Capaian Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	100%	75%	75	<ul style="list-style-type: none"> - Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, karena ketidakjelasan informasi besaran anggaran, banyak SKPD seringkali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui juga semakin banyak sehingga mempengaruhi deadline jadwal penganggaran; - Ketersediaan dana yang terbatas sehingga mempengaruhi waktu dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA); - Intervensi hak budget DPRD terlalu kuat dimana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-kegiatan reses yang menyimpang dari RPJMD; - Terlalu banyak "order" dalam proses perencanaan penganggaran yang masing-masing ingin menjadi arus utama; - Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan penganggaran masih lemah dan SKPD yang mempunyai alokasi anggaran besar misal Dinas Pendidikan dan Dinas PU seringkali tidak mempunyai tenaga perencana dan penganggaran yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan penganggaran yang terstruktur agar besaran penerimaan dan besaran anggaran belanja dapat dihitung secara seimbang sehingga tidak mempengaruhi waktu dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA); - Sosialisasi kepada Anggota DPRD dan pembahasan secara berkala agar kegiatan - kegiatan reses yang diusulkan agar mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati yang ada pada RPJMD; - Penentuan skala prioritas program pembangunan yang akan dilakukan agar tepat dalam penganggaran; - Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan penganggaran melalui FGD dan Pendampingan serta Pemenuhan Tenaga Pendukung dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perencanaan Penganggaran agar lebih memadai

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.

**Analisis Penggunaan Sumber Daya
Capaian Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan**

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran(Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	75%	75	1.150.000.000	1.100.496.750	95,70	Baik

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 5.6.

**Analisis Program Penunjang Keberhasilan
Capaian Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	75	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rancangan Perda APBD yang disetujui Tepat Waktu	75	Menunjang
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Jenis Dokumen yang dihasilkan	100	Menunjang

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2021, pada tahun 2021 sudah sesuai dengan target, meskipun belum maksimal.

5) Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sasaran 5. "Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah" mendukung atas ketercapaian Indikator Tujuan "Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel” yaitu “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Sasaran 5. “Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah” pada tahun 2021 terdiri dari indikator “Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu” yang diukur dengan membandingkan jumlah SKPD yang Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu dengan Total Jumlah SKPD yang ada.

Pada tanggal 27 Maret 2021 Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah secara akuntabel meskipun masih ada beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti sehingga dapat dinilai bahwa Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu adalah 100%. Sedangkan Pada Tahun 2021 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah telah memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sehingga dapat dinilai Capaian atas Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 100%.

Adapun target dan Realisasi Capaian pada Sasaran 5. “Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Tabel 5.7.
Target dan Realisasi
Capaian Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	Baik	Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 nomor
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100%	100	Baik	53A/LHP/XVIII.SM G/05/2021 tanggal 18 Mei 2021

Adapun perbandingan target,realisasi dan capaian kinerja dalam kurun waktu 2019 sd 2021 untuk capaian sasaran 5 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8.

**Perbandingan Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 sd 2021
Capaian Sasaran 5. Meningkatkan Kualitas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%) 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%) 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

Untuk perbandingan realisasi kinerja sasaran 5 tersebut diatas pada tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan
Target Akhir Renstra 2016-2021
Capaian Sasaran 5. Meningkatkan Kualitas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	100%

Adapun analisis penyebab meningkatnya kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.0.
Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja
Capaian Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

No	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:	Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rembang antara lain agar memerintahkan:
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100%	100	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian atas pengelolaan sewa pemanfaatan barang milik daerah Pemkab Rembang di kawasan Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang belum memadai mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pendapatan retribusi sewa ruko sebesar Rp. 42.875.000,- dan kekurangan penerimaan pendapatan retribusi TRP Kartini sebesar Rp. 113.632.000,00 - Pencatatan persediaan tidak tertib mengakibatkan laporan persediaan tidak informatif dan selisih atas pengadaan aspal mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 655.569.680,- - Pertanggungjawaban belanja oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup tidak sah sebesar Rp. 362.975.994,- 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pariwisata melakukan penelaahan perjanjian sewa asset, dan segera memungut pendapatan sewa ruko/ kios TA 2020 sebesar Rp. 42.875.000,-, untuk selanjutnya disetor ke kas daerah dan menginstruksikan Bendahara Penerimaan segera menyetorkan kekurangan penerimaan atas pendapatan retribusi TRP Kartini sebesar Rp. 113.632.000,00 ke kas daerah; - Kepala Dinas PU untuk menginstruksikan PPK Kegiatan Bidang bina Marga melaksanakan proses pengadaan aspal sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 655.569.680,- untuk kemudian disetorkan ke kas daerah; - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menginstruksikan Sekretaris DLH selaku PPK SKPD melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dengan benar sesuai ketentuan dan menginstruksikan Bendahara Pengeluaran DLH agar melakukan pembukuan secara tertib, cash opname

							secara tertib, membuat Laporan Pengesahan/Laporan Pertanggungjawaban fungsional kepada BUD sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, dan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp. 362.975.994,-
--	--	--	--	--	--	--	---

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Analisis Penggunaan Sumber Daya
Capaian Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran(Rp.)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	100	1.350.000.000	1.166.557.410	86,41	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100	680.000.000	543.711.005	79,96	Cukup

Terakhir akan disampaikan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 6.2.
Analisis Program Penunjang Keberhasilan
Capaian Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	100	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan	100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan		Menunjang

	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu		Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu		
--	-------------------	---	--	---------------------------	---	--	--

Dari berbagai tabel analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah pada tahun 2021 sudah sesuai dengan target.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, pada tahun anggaran 2021 BPPKAD Kabupaten Rembang melaksanakan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 6.3.

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan BPPKAD tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.677.314.147,00	17.292.912.091,00	92,58%
	1 .Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.675.000,00	60.213.500,00	82,85%
	a.. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.200.000,00	25.935.000,00	88,81%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00	9.449.500,00	94,49%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	3.627.000,00	90,67%
	d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.475.000,00	21.202.000,00	71,93%
	2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.356.574.147,00	14.129.455.273,00	90,94%
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.747.804.147,00	13.538.799.873,00	91,80%
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	582.770.000,00	571.763.100,00	98,11%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000,00	11.022.300,00	91,85%
	d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.000.000,00	7.960.000,00	56,85%
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.350.000,00	10.353.000,00	63,32%
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.350.000,00	10.353.000,00	63,32%
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.000.000,00	381.373.757,00	96,79%
	a. Penyediaan Komponen Instalasi	7.000.000,00	6.053.000,00	86,47%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.000.000,00	28.365.700,00	97,81%
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000,00	10.715.500,00	89,29%
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	56.640.700,00	94,40%
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	137.000.000,00	134.768.400,00	98,37%
	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000,00	8.490.000,00	94,33%
	g. Penyediaan Bahan/Material	60.000.000,00	59.846.000,00	99,74%
	h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	76.494.457,00	95,61%
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	924.520.000,00	867.503.500,00	93,83%
	a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	512.000.000,00	511.891.000,00	99,97%
	b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000,00	144.891.000,00	85,23%
	c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208.995.000,00	208.524.500,00	99,77%
	d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.525.000,00	33.400.000,00	99,62%
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1.639.709.000,00	1.578.334.011,00	96,25%
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	2.197.000,00	81,37%
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.200.000,00	207.341.821,00	80,92%
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.380.809.000,00	1.370.992.190,00	99,28%
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.486.000,00	265.679.050,00	97,14%
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.956.000,00	116.655.700,00	97,24%
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.800.000,00	30.235.000,00	98,16%
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	59.901.350,00	99,83%
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.730.000,00	58.887.000,00	93,87%
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	396.286.247.000,00	395.041.421.635,00	99,68%
	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.150.000.000,00	1.100.496.750,00	95,69%
	a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	340.000.000,00	314.828.400,00	92,59%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	80.000.000,00	77.898.750,00	97,37%
	c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	30.000.000,00	29.977.200,00	99,92%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	30.000.000,00	29.992.750,00	99,97%
	e. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	100.000.000,00	99.784.000,00	99,78%
	f. Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	130.000.000,00	123.871.050,00	95,28%
	g. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	60.000.000,00	52.920.000,00	88,20%
	h. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	50.000.000,00	49.515.650,00	99,23%
	i. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	255.000.000,00	246.814.450,00	96,78%
	j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	75.000.000,00	74.894.500,00	99,85%
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	798.994.000,00	782.743.450,00	97,96%
	a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	50.000.000,00	49.791.000,00	99,58%
	b. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60.000.000,00	59.987.400,00	99,97%
	c. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	50.000.000,00	46.020.800,00	92,04%
	d. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	380.250.000,00	373.495.650,00	98,22%
	e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	209.000.000,00	204.734.350,00	97,95%
	f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	49.744.000,00	48.714.250,00	97,92%
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	680.000.000,00	543.711.005,00	79,95%
	a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	43.033.050,00	26.432.300,00	61,42%
	b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	23.430.000,00	19.822.000,00	84,60%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3.920.260,00	1.677.800,00	42,79%
	d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	198.702.400,00	182.828.000,00	92,01%
	e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	66.455.490,00	55.176.680,00	83,02%
	f. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	134.528.300,00	100.966.400,00	75,05%
	g. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	47.460.500,00	37.694.600,00	79,42%
	h. Pembinaan Akuntansi, pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	153.760.000,00	138.778.950,00	90,25%
	i. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	3.900.000,00	3.380.000,00	86,66%
	j. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	4.810.000,00	438.000,00	9,10%
	4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	393.657.253.000,00	392.614.470.430,00	99,73%
	a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	375.259.329.000,00	375.159.329.000,00	99,97%
	b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.425.000.000,00	5.482.217.430,00	85,32%
	c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	11.972.924.000,00	11.972.924.000,00	100%
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.350.000.000,00	1.166.557.410.000,00	86,41%
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.350.000.000,00	1.166.557.410.000,00	86,41%
	a. Penyusunan Standar Harga	150.000.000,00	121.975.500,00	81,31%
	b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	71.500.000,00	63.918.650,00	89,39%
	c. Penatausahaan Barang Milik Daerah	248.700.000,00	190.760.250,00	76,70%
	d. Pengamanan Barang Milik Daerah	480.000.000,00	453.925.260,00	94,56%
	e. Penilaian Barang Milik Daerah	90.000.000,00	72.399.750,00	80,44%
	f. Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	70.000.000,00	57.899.250,00	82,71%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	g. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	170.000.000,00	148.817.750,00	87,53%
	h. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	69.800.000,00	56.861.000,00	81,46%
III	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.760.000.000,00	3.255.750.086,00	86,58%
	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.760.000.000,00	3.255.750.086,00	86,58%
	a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	247.240.000,00	226.740.000,00	91,70%
	b. Analisa dan Pengembangan Pendapatan Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	442.600.000,00	241.392.164,00	54,53%
	c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	481.700.000,00	456.928.000,00	94,85%
	d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	199.400.000,00	173.276.830,00	86,89%
	e. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	258.500.000,00	245.933.000,00	95,13%
	f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan 52a katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.363.000.000,00	1.241.452.500,00	91,08%
	g. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	216.560.000,00	194.811.500,00	89,95%
	h. Penagihan Pajak Daerah	518.000.000,00	452.440.496,00	87,34%
	i. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	33.000.000,00	22.775.596,00	69,01%
	JUMLAH	420.073.561.147,00	392.614.470.430,00	93,46%

Dari total anggaran senilai Rp. 420.073.561.147,00, yang terealisasi sejumlah Rp. 392.614.470.430,00, sehingga capaian sebesar 93,46%, ini berarti capaian anggaran BPPKAD selama kurun waktu 2021 terhitung baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun. Dalam Renstra tahun 2016 - 2021, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang menetapkan 3 Tujuan dan 5 sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Untuk mencapai sasaran, maka ditetapkan kebijakan dan program - program dijabarkan menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap - tiap tahun bertahap. Tiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan evaluasi hasil kinerja untuk mengetahui keberhasilan program dalam mencapai sasaran.

Berdasarkan analisa atas realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja yang telah ditetapkan menunjukkan keberhasilan karena rata-rata indikator kinerjanya lebih dari 163,02% dan masuk pada kategori capaian sangat tinggi. Keberhasilan ini bukan suatu hal yang mudah diperoleh, karena dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak dijumpai hambatan yang cukup serius, antara lain ketidaktaatan Wajib Pajak/Retribusi dalam membayar Pajak/Retribusi. Kurangnya kualitas dan kuantitas petugas pemungut pajak, kurangnya koordinasi antar Badan/instansi dalam melaporkan aset-asetnya, terbatasnya pendataan aset daerah.

Meskipun pencapaian kinerja sudah diatas 163,02%, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang berusaha untuk meningkatkan kinerjanya lebih maksimal lagi agar kedepan capaian kinerjanya lebih baik dari tahun sebelumnya dan agar dapat mempertahankan pada kategori sangat tinggi atau diatas 90%. Strategi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja adalah melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak/retribusi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan sumber daya aparat daerah. Koordinasi antar Badan/instansi mengenai aset / barang milik daerah. Sedangkan strategi yang terkait dengan program / kegiatan, pada tahun 2021 lebih diprioritaskan pada program / kegiatan yang indikator capaian kinerjanya ditahun sebelumnya masih rendah.

4.2 REKOMENDASI

Hambatan - hambatan yang dijumpai pada pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 perlu segera diselesaikan agar dampaknya dapat diminimalisir dan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 untuk lebih

meningkatkan capaian kinerja. Kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 diantisipasi sejak dini demi kelancaran pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang terkait dengan peningkatan mutu, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang merencanakan pemecahan secara sistematis dan bertahap baik mengenai pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya aparat dan administrasi aset daerah. Dengan perencanaan dan pemecahan yang sistematis, diharapkan pada tahun 2022 realisasi capaian kinerja dapat ditingkatkan.

Rembang, 18 Pebruari 2022
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



FERY SUMARDI, SE., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710225 199803 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumank - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 20 Mei 2021

Nomor : **169** /S/XVIII.SMG/05/2021
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2020

Kepada Yth.
Bupati Rembang
Di
Rembang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 900/0019 /2019

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, perlu menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa dalam rangka memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Kinerja RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

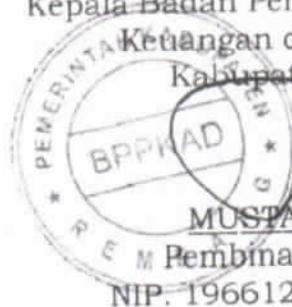
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mencabut Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Nomor 050/0045/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Rembang tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Juni 2019

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

A circular official stamp with the text "PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG" around the perimeter and "BPPKAD" in the center. A signature is written over the stamp.

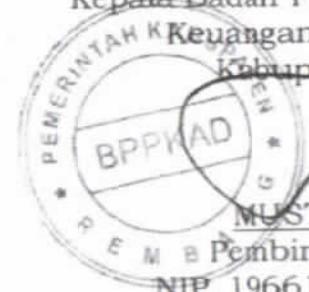
MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004

LAMPIRAN : Keputusan Kepala BPPKAD
Kabupaten Rembang
Nomor : 900/0019 /2019
Tanggal : 14 Juni 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 - 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG-JAWAB
1	3	4	5	6	7
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Opini BPK atas LKPD	Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK	Semua SKPD dengan Dikoordinasi BPPKAD
2.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$	LRA Tahunan	Bidang Pendapatan
3.	Persentase Peningkatan PAD	%	$\frac{\text{PAD Th (n)} - \text{PAD Th (n-1)}}{\text{PAD Th (n-1)}} \times 100 \%$	LRA Tahun (n) dan LRA Tahun (n-1)	Bidang Pendapatan
4.	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	%	$\frac{\text{Tepat Waktu APBD Induk} + \text{Perubahan APBD}}{2} \times 100 \%$	Tanggal Penetapan Perda APBD Induk dan Perda Perubahan APBD	Bidang Anggaran
5.	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	%	Akuntabilitas Penyajian LKPD dan Penyampaian LKPD Tahun (n-1) sebelum tanggal 31 Maret Tahun (n)	Berita Acara Serah Terima LKPD	Bidang Akuntansi dan Bidang Aset

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PAKTA INTEGRITAS

Saya NUR SUSILOWATI, SE, Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Rembang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan :

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004

Rembang, 04 Januari 2021

Sekretaris Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

NUR SUSILOWATI, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19641128 199402 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : NUR SUSILOWATI, SE
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUSTAIN, SH, MM
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

NUR SUSILOWATI, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19641128 199402 2 001

Pihak Kedua,

MUSTAIN, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661204 199303 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	70%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	95%
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%

Program :

Anggaran :

Keterangan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 440.338.789.000,- APBD

Rembang, 04 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang



MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004

Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

NUR SUSIOWATI, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19641128 199402 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PAKTA INTEGRITAS

Saya Drs. ROMLI, Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Rembang menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Rembang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan :

Rembang, 04 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD
Kabupaten Rembang



MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004

Drs. ROMLI
Pembina
NIP. 19640608 198508 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Drs. ROMLI
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUSTAIN, SH, MM
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004

Rembang, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,


Drs. ROMLI
Pembina
NIP. 19640608 198508 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG PENDAPATAN
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%

Program :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Anggaran :

Rp. 4.000.000.000,-

Keterangan :

APBD

Rembang, 04 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004

Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD
Kabupaten Rembang

Drs. ROMLI
Pembina
NIP. 19640608 198508 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PAKTA INTEGRITAS

Saya HARI SUSILOWATI, SE, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Rembang menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Rembang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan :

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang



MUSTAIN, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661204 199303 1 004

Rembang, 04 Januari 2021

Kepala Bidang Anggaran dan
Perbendaharaan BPPKAD
Kabupaten Rembang

HARI SUSILOWATI, SE

Pembina

NIP. 19630701 198711 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : HARI SUSILOWATI, SE
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUSTAIN, SH, MM
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004

Rembang, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,


HARI SUSILOWATI, SE
Pembina,
NIP. 19630701 198711 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN BPPKAD
KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Rancangan Perda APBD yg disampaikan Tepat Waktu	100%

Program :

Anggaran :

Keterangan :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengembangan Rp. 416.182.834.000,- APBD
 Pengelolaan Keuangan Daerah

Rembang, 04 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Rembang

Kepala Bidang Anggaran dan
 Perbendaharaan BPPKAD
 Kabupaten Rembang



MUSTAIN, SH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661204 199303 1 004

HARI SUSIOWATI, SE
 Pembina
 NIP. 19630701 198711 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PAKTA INTEGRITAS

Saya IFVO FERRYATAMA, SSTP, M.Si, Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Rembang menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Rembang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan :

Rembang, 04 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Kepala Bidang Aset BPPKAD
Kabupaten Rembang



MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004

IFVO FERRYATAMA, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 19810209 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : IFVO FERRYATAMA, SSTP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUSTAIN, SH, MM
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004

Rembang, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

IFVO FERRYATAMA, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 19810209 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BIDANG ASET
BPPKAD KABUPATEN REMBANG

No.	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	100%

Program :

1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Anggaran :

Rp. 1.000.000.000,-

Keterangan :

APBD

Rembang, 04 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Rembang



MUSTAIN, SH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661204 199303 1 004

Kepala Bidang Aset BPPKAD
 Kabupaten Rembang

IFVO FERRYATAMA, SSTP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19810209 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114

Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PAKTA INTEGRITAS

Saya SRI NURJANTI, SE, MM, Kepala Bidang Akuntansi BPPKAD Kabupaten Rembang menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam melaksanakan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Rembang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

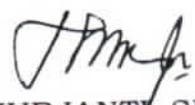
Menyaksikan :

Rembang, 04 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

Kepala Bidang Akuntansi BPPKAD
Kabupaten Rembang


MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004


SRI NURJANTI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720205 199803 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : SRI NURJANTI, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPPKAD Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUSTAIN, SH, MM
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004

Rembang, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

SRI NURJANTI, SE, MM
Pembina
NIP. 19720205 199803 2 007

